

Melindungi dan Mengelola Gambut untuk Masa Depan Hijau

Selayang Pandang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan





Taklimat (Berita Iklim Singkat)

Edisi Bentang Lahan #03

Melindungi dan Mengelola Gambut untuk Masa Depan Hijau

Selayang Pandang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Tim Penyusun *berdasarkan alfabet*

Agrian Maulana¹, Andree Ekadinata¹, Anugerah Yuliadi¹, Arga Pandiwijaya¹, Ariyati², Bambang Prayitno², Benni Yusnandarsyah², David Susanto¹, Deny Sahid², Era Irhami¹, Faza Iza Mahesz¹, Feri Johana¹, Hadenli Ugihan², Harry Aksomo¹, Herdi Apriansyah², Ira Ratna Sari¹, Jun Harbi², Momon Sodik², Regina Ariyanti², Rendra Bayu Prasetyo¹, Seruni Fauzia Lestari¹, Sonya Dewi¹, Syafrul Yunardy², Tania Benita¹, Wilman²

¹ CIFOR-ICRAF Program Indonesia, ² Pokja RPPEG

Sitasi

Maulana A, Ekadinata A, Yuliadi A, Pandiwijaya A, Ariyati, Prayitno B, Yusnandarsyah B, Susanto D, Sahid D, Irhami E, Mahesz FI, Johana F, Ugihan H, Aksomo H, Apriansyah H, Sari IR, Harbi J, Sodik M, Ariyanti R, Prasetyo RB, Lestari SF, Dewi S, Yunardy S, Benita T, Wilman. 2024. *Taklimat Edisi Bentang Lahan #03 - Melindungi dan Mengelola Gambut untuk Masa Depan Hijau: Selayang Pandang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan*. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF Program Indonesia.

Ketentuan dan Hak Cipta

CIFOR-ICRAF Program Indonesia memegang hak cipta atas publikasi dan halaman webnya, namun memperbanyak untuk tujuan non-komersial dengan tanpa mengubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyakan tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan. Link situs yang CIFOR-ICRAF Program Indonesia sediakan memiliki kebijakan tertentu yang harus dihormati. CIFOR-ICRAF Program Indonesia menjaga database pengguna meskipun informasi ini tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk mengukur kegunaan informasi tersebut. Informasi yang diberikan CIFOR-ICRAF Program Indonesia, sepengetahuan kami akurat, namun kami tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggung jawab apabila timbul kerugian akibat penggunaan informasi tersebut. Tanpa pembatasan, silakan menambah link ke situs kami www.cifor-icraf.org pada situs anda atau publikasi.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Riky M Hilmansyah

2024

Daftar singkatan

API	Adaptasi perubahan Iklim
BAU	<i>Business As Usual</i>
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPDAS	Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
DAS	Daerah Aliran Sungai
DMPG	Desa Mandiri Peduli Gambut
DLHP	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPSIR	<i>Driver, Pressure, State, Impacts, and Response</i>
EG	Ekosistem Gambut
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FBEG	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut
FEG	Fungsi Ekosistem Gambut
FGD	<i>Focus Discussion Group</i>
FLEG	Fungsi Lindung Gambut

FOLU	Forest and Other Land Uses
GRK	Gas Rumah Kaca
HCS	<i>High Carbon Sequestration</i>
HCV	<i>High Conservation Value</i>
KHG	Kesatuan Hidrologis Gambut
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
NGO	<i>Non-Governmental Organisation</i>
PIJLH	Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup/Ekosistem
PIPIB	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut
PUBMTR	Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Tata Ruang
PPEG	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPPEG	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
TRGD	Tim Restorasi Gambut Daerah
UPT	Unit Pelaksana Teknis

Daftar Istilah

Adaptasi perubahan iklim	: Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
Agroforestri	: Tipe penggunaan lahan yang dikembangkan dengan menggabungkan komponen tanaman semusim, tanaman tahunan, dan/atau ternak dalam waktu yang bersamaan atau bergiliran dalam suatu periode tertentu.
Agrosilvofisleri	: Tipe penggunaan lahan yang dikembangkan dengan menggabungkan komponen tanaman semusim, tanaman tahunan, dan perikanan dalam waktu bersamaan atau bergiliran dalam suatu periode tertentu.
Analisis dampak (ex-ante analysis)	: Analisis yang dilakukan untuk memprediksi dampak intervensi dari suatu objek/kebijakan baik dari aspek ekonomi, lingkungan (biofisik), sosial, serta keruangan.
Ekosistem gambut	: Tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya.
Emisi GRK	: Lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	: Tatanan unsur gambut yang mempunyai karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, menyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.

Fungsi Budaya Ekosistem Gambut	: Tatanan unsur gambut yang mempunyai karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas ekosistem gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.
Gambut	: Material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
<i>Good agricultural practices</i>	: Sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usahatani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani.
Kawasan hidrologis gambut	: Ekosistem gambut yang letaknya di antara dua sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
Mitigasi perubahan iklim	: Usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
Pemanfaatan ekosistem gambut	: Terdiri dari pemanfaatan ekosistem gambut pada fungsi lingkungan (penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan) dan pemanfaatan gambut pada fungsi budidaya.
Pemeliharaan ekosistem gambut	: Dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut dan/atau pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Pengendalian ekosistem gambut	: Terdiri dari pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.
Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	: Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Perubahan iklim	: Berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
Skenario <i>Business as Usual</i> (BAU)	: Skenario yang dikembangkan berdasarkan kondisi perubahan tutupan/penggunaan lahan dari masa lalu.
Skenario target program (TAR)	: Skenario yang dibangun dari berbagai target yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
Skenario ambisius (AMBI)	: Skenario yang dibangun berdasarkan nilai target yang ditetapkan pada Rincian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Mengapa Gambut Penting?

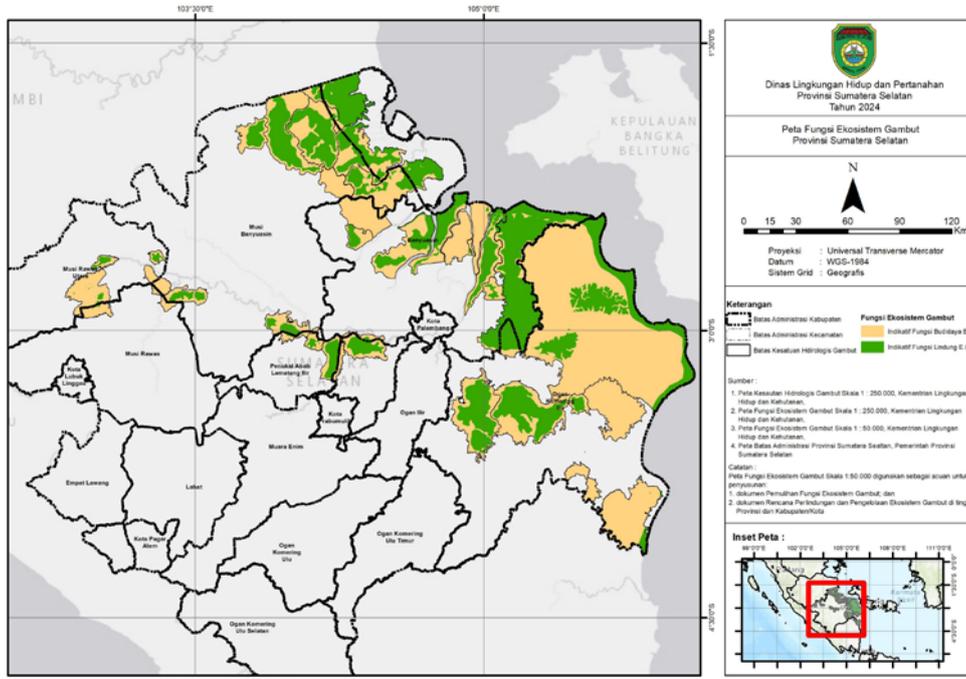
Gambut memiliki berbagai peran:

- Menyimpan cadangan karbon, jika dilepaskan ke udara akan berubah menjadi emisi gas rumah kaca yang mengancam perubahan iklim.
- Menjaga tata air, mengurangi kekeringan pada musim kemarau dan mencegah banjir pada musim hujan.
- Menopang penghidupan masyarakat, memberikan jasa dan manfaat melalui kegiatan pertanian, perikanan dan usaha ekonomi khas gambut lainnya.
- Menjaga keanekaragaman hayati, sebagai habitat banyak spesies tumbuhan dan hewan

Berdasarkan SK Menteri LHK No. 129 dan No. 130 Tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi prioritas di Indonesia dalam penanganan ekosistem gambut. **Lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2,09 juta hektar.**



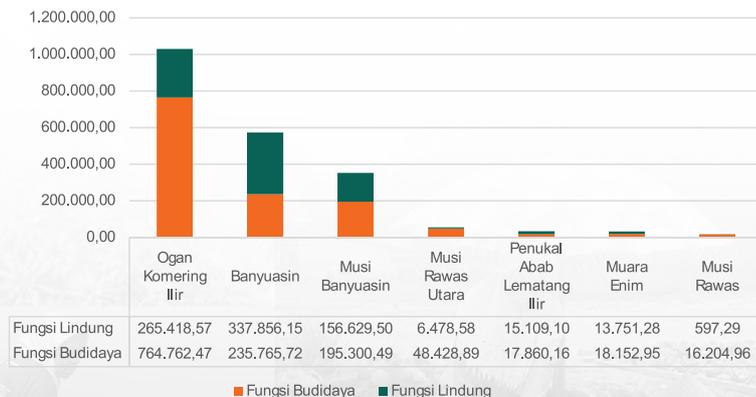
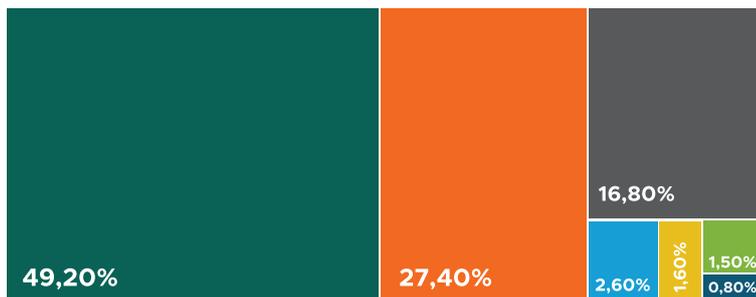
Distribusi Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Sumatera Selatan



- Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari **36 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)**
- Luas dominan teridentifikasi di **OKI (49%)** dan **Banyuasin (27%)**
- Proporsi fungsi budidaya lebih mendominasi daripada fungsi lindung di mayoritas kabupaten, kecuali Kabupaten Banyuasin. di meyoritas kabupaten, kecuali Kabupaten Banyuasin.

Sebaran Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan

■ Ogan Komering Ilir
 ■ Banyuasin
 ■ Musi Banyuasin
 ■ Musi Rawas Utara
■ Penukul Abab Lematang Ilir
 ■ Muara Enim
 ■ Musi Rawas



Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi agroforestri.id/rppegsusel

Mengapa perlu membuat RPPEG?

- Demi melestarikan fungsi ekosistem gambut serta mencegah rusaknya, perlu upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Semua upaya tersebut dituangkan dalam dokumen RPPEG.
- Penyusunan dokumen RPPEG di Provinsi Sumatera Selatan adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional dan Provinsi

Nasional

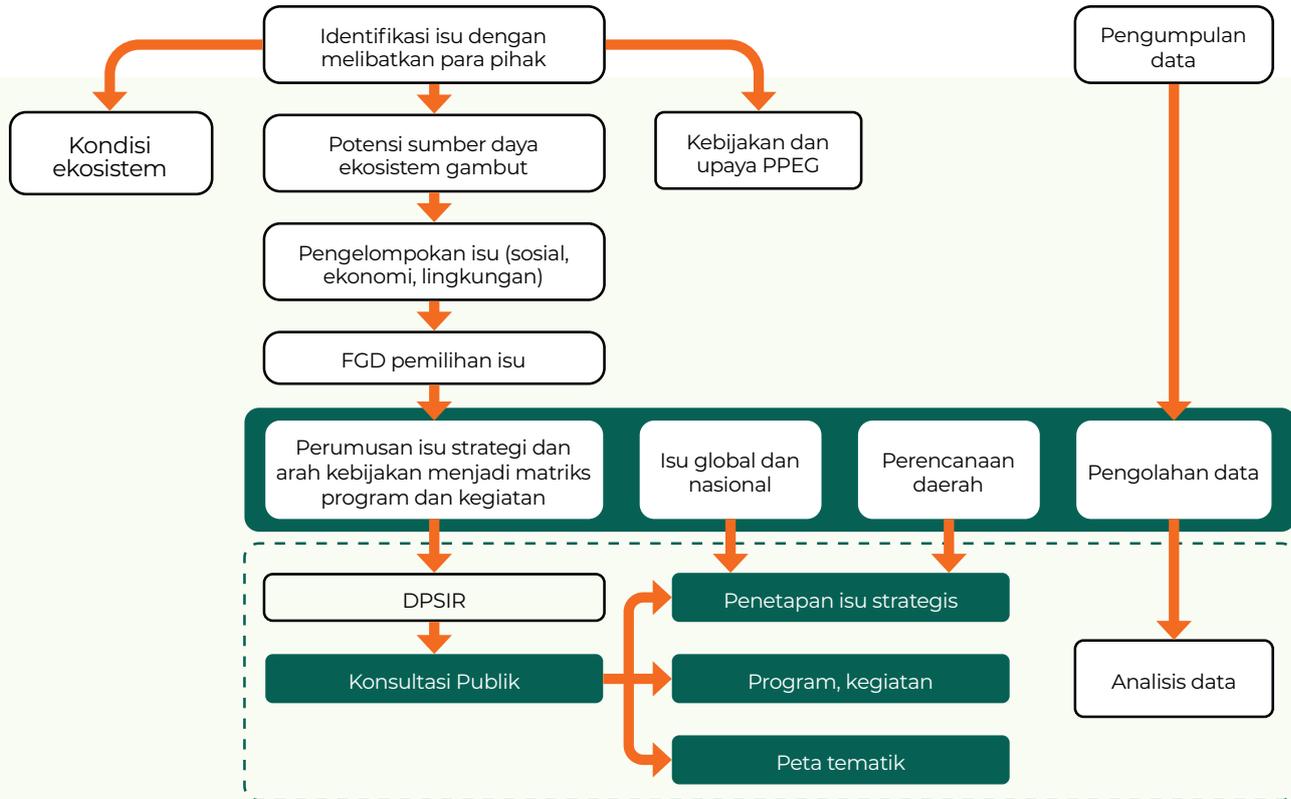
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 246 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional Tahun 2020-2049

Provinsi

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Ekosistem Gambut



Bagaimana proses penyusunan RPPEG?



Strategi, arah kebijakan, dan program RPPEG Sumatera Selatan

No	Strategi dan arah kebijakan	No Program	Program	Indikator kinerja program	Target	Indikasi Tata Waktu (per 5 tahun)						Instansi pelaksana	
						I	II	III	IV	V	VI		
A Pemanfaatan Ekosistem Gambut													
A.1 Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut													
A.1.1	Pengaturan (Peningkatan jumlah) penelitian dan pengumpulan data kondisi dan potensi ekosistem gambut	A.1.1.1	Pengembangan Penelitian Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	Tersedianya hasil penelitian dalam fungsi lindung ekosistem gambut (perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati)	36 KHG	v	v						Lembaga Penelitian, DLHP, Dinas Kehutanan, NGO, mitra pembangunan
A.1.2	Pengaturan alokasi penataan ruang	A.1.2.1	Penyusunan rencana tata kelola ekosistem gambut	Terdapat basis data pemetaan ruang gambut* (karakteristik gambut)	1 dokumen	v		v					Dinas PUBMTR, Lembaga Penelitian
				Terdapat tata batas kawasan dan alokasi ruang untuk kegiatan masyarakat	1 dokumen	v		v					Dinas PUBMTR, Dinas Kehutanan, DLHP, KPH, pemerintah desa
A.1.3	Pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem gambut	A.1.3.1	Pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten dalam perencanaan pemanfaatan fungsi lindung ekosistem gambut	Terdapat dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat kabupaten yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	7 Dokumen	v							Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten, DLHP Provinsi, DLH Kabupaten
		A.1.3.2	Peningkatan (menjaga/meningkatkan luasan dan jumlah vegetasi) fungsi jasa lingkungan ekosistem gambut	Terdapat skema pemanfaatan jasa lingkungan yang menguntungkan masyarakat sekitar	1 dokumen	v	v						

No	Strategi dan arah kebijakan	No Program	Program	Indikator kinerja program	Target	Indikasi Tata Waktu (per 5 tahun)						Instansi pelaksana
						I	II	III	IV	V	VI	
A.II Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut												
A.II.1	Inventarisasi opsi penghidupan fungsi budidaya ekosistem gambut dengan menjaga fungsi hidrologis gambut	A.II.1.1	Penelitian opsi penghidupan pada Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	Tersedianya hasil penelitian opsi pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem gambut) untuk penghidupan masyarakat setempat (<i>local wisdom</i>)	1 dokumen	v	v					Lembaga Penelitian, penyuluh, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, NGO, mitra pembangunan, perguruan tinggi.
		A.II.1.2	Peningkatan produktivitas Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (kemampuan lahan untuk suatu komoditi)	Tingkat produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perairan di ekosistem gambut (%)	5% per 5 tahun	v	v	v	v	v	v	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase luasan sistem pertanian paludikultur (agroforestri, silvofishery, minapadi, dsb) yang lebih variatif dan tetap menjaga fungsi hidrologis gambut	10% per 5 tahun	v	v	v	v	v	v	Litbang Pertanian, perguruan tinggi, NGO, mitra pembangunan, swasta Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Strategi dan arah kebijakan	No Program	Program	Indikator kinerja program	Target	Indikasi Tata Waktu (per 5 tahun)						Instansi pelaksana
						I	II	III	IV	V	VI	
A.II.2	Pengembangan opsi penghidupan fungsi budidaya ekosistem gambut dengan pelibatan (pemberdayaan) masyarakat desa	A.II.2.1	Peningkatan kapasitas masyarakat desa gambut dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan	Tersedia alternatif sumber mata pencaharian masyarakat desa gambut	1 Dokumen	v	v	v	v	v	v	DPMD, DLHP, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, swasta, penyuluh, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, KPH UPT KLHK, NGO, mitra pembangunan
		A.II.2.2	Pelibatan dan pemberdayaan perempuan dalam mengelola jasa ekosistem dan komoditas di lahan gambut	Persentase keterlibatan perempuan yang mengelola jasa ekosistem dan komoditas gambut	30%	v	v	v	v	v	v	Aparat desa, swasta, penyuluh, Dinas Kehutanan, KPH UPT KLHK, NGO, mitra pembangunan
A.II.3	Peningkatan produktivitas pada pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem gambut	A.II.3.1	Peningkatan usaha/ kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut berbasis korporasi dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya	Dokumen pemantauan dan evaluasi usaha pemanfaatan gambut berbasis korporasi secara berkala	1 dokumen/5 tahun	v	v	v	v	v	v	DPLH, perusahaan
		A.II.3.2	Pengembangan kawasan ekowisata gambut	Jumlah kawasan ekowisata gambut yang dikelola oleh masyarakat	7 kawasan	v	v	v	v	v	v	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		A.II.3.3	Pengembangan infrastruktur penunjang pemanfaatan (pengelolaan) fungsi budidaya ekosistem gambut	Terbangunnya aksesibilitas guna mendukung pemanfaatan (pengelolaan) di areal KHG	36 KHG							

No	Strategi dan arah kebijakan	No Program	Program	Indikator kinerja program	Target	Indikasi Tata Waktu (per 5 tahun)						Instansi pelaksana
						I	II	III	IV	V	VI	
B Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut												
B.1 Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut												
B.1.1	Pengelolaan tata air di ekosistem gambut (untuk melindungi kubah gambut suatu KHG)	B.1.1.1	Pengembangan sistem pengawasan tata air	Terdapat sistem pengawasan tata air yang memantau tinggi muka air gambut di area berizin maupun non berizin	36 KHG	v	v	v	v	v	v	DLHP, KPH, Dinas Kehutanan, BPDAS, Forum DAS
		B.1.1.2	Pengembangan kebijakan untuk menjaga tata air ekosistem gambut	Terdapat kebijakan tata kelola air dan pembatasan drainase di ekosistem gambut	1 Dokumen	v	v	v	v	v		DLHP, KPH, Dinas Kehutanan, BPDAS, Forum DAS
		B.1.1.3	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	100%	v	v	v	v	v		Dinas Kehutanan, UPT KLHK, NGO, Mitra Pembangunan
B.1.2	Pengawasan ekosistem gambut dari pembukaan lahan dan alih fungsi lahan:1 (kegiatan apapun berdasarkan fungsi ekosistem gambut/neraca air KHG/kemampuan lahan/karakteristik lahan/local wisdom), 2. pemberian izin dll taat aturan yang berlaku, 3. Pengawasan pelaksanaan kegiatan (pihak terkait/ masyarakat)	B.1.2.1	Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan pemanfaatan fungsi ekosistem gambut yang melibatkan masyarakat	Terdapat sistem pemantauan dan pengawasan pencegahan kerusakan ekosistem gambut yang terintegrasi	1 aplikasi	v						DLHP, Dinas Kehutanan, perusahaan, BPBD
		B.1.2.2	Pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas terbakar di ekosistem gambut	Turunnya luasan kebakaran di ekosistem gambut	15% per tahun	v	v	v	v	v	v	Kelompok Masyarakat, Pemerintah Desa, perusahaan, DLHP, Dinas Kehutanan, BPBD
		B.1.2.3	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengembangan teknik pembukaan lahan yang ramah gambut/ lingkungan	Tingkat adopsi masyarakat terkait penerapan pembukaan lahan yang ramah gambut/lingkungan	100%	v	v	v	v	v	v	DLHP, Lembaga restorasi, DPMD, Dinas Kehutanan, perusahaan, perguruan tinggi

No	Strategi dan arah kebijakan	No Program	Program	Indikator kinerja program	Target	Indikasi Tata Waktu (per 5 tahun)						Instansi pelaksana
						I	II	III	IV	V	VI	
B.I.1	Pengelolaan tata air di ekosistem gambut (untuk melindungi kubah gambut suatu KHG)	B.I.1.1	Pengembangan sistem pengawasan tata air	Terdapat sistem pengawasan tata air yang memantau tinggi muka air gambut di area berizin maupun non berizin	36 KHG	v	v	v	v	v	v	DLHP, KPH, Dinas Kehutanan, BPDAS, Forum DAS
		B.I.1.2	Pengembangan kebijakan untuk menjaga tata air ekosistem gambut	Terdapat kebijakan tata kelola air dan pembatasan drainase di ekosistem gambut	1 Dokumen	v	v	v	v	v		DLHP, KPH, Dinas Kehutanan, BPDAS, Forum DAS
B.II Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut												
B.II.1	Pengendalian dan penanggulangan bencana di kawasan ekosistem gambut	B.II.1.1	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase teratasnya penanganan risiko akibat bencana	100%	v	v	v	v	v	v	BPBD, Dinas Kehutanan
		B.II.1.2	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Terlaksananya pengawasan kepada pelaku usaha perkebunan	100%	v	v	v	v	v	v	Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan, BPBD
B.II.2	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan kerusakan ekosistem gambut	B.II.2.1	Peningkatan kemitraan dan kebijakan dalam penanggulangan kerusakan ekosistem gambut	Terlibatnya kelompok organisasi dalam penanggulangan kerusakan ekosistem gambut	50 kelompok	v	v	v	v	v	v	OPD Terkait, pemerintah Desa, swasta, NGO
B.II.3	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan pelibatan para pihak	B.II.3.1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di tingkat tapak/desa dalam penanggulangan kebakaran	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas	50 kegiatan							Dinas Kehutanan, masyarakat, BPBD, perusahaan, DLHP
		B.II.3.2	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Tersedia sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di areal rawan terbakar	1 paket/KHG	v	v	v	v	v	v	Dinas Kehutanan, masyarakat, BPBD, perusahaan, DLHP

No	Strategi dan arah kebijakan	No Program	Program	Indikator kinerja program	Target	Indikasi Tata Waktu (per 5 tahun)						Instansi pelaksana
						I	II	III	IV	V	VI	
B.III Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut												
B.III.1	Penentuan prioritas lokasi restorasi gambut (fungsi lindung, tingkat kerusakan)	B.III.1.1	Identifikasi kondisi (tingkat) kerusakan gambut secara berkala	Tersedia data dan peta kerusakan ekosistem gambut yang diperbaharui secara berkala	1 dokumen	v	v	v	v	v	v	Dinas Kehutanan, DLHP, UPT KLHK
B.III.2	Pemulihan ekosistem gambut dengan <u>tanaman asli</u>	B.III.2.1	Pemulihan ekosistem gambut yang mengalami kerusakan (restorasi, rehabilitasi, revegetasi, dan suksesi alami)	Persentase Luas kerusakan ekosistem gambut yang direstorasi	100%	v	v	v	v	v	v	Dinas Kehutanan, masyarakat, DLHP, perusahaan, NGO, UPT KLHK, mitra pembangunan
C. Pemeliharaan Ekosistem Gambut												
C.I Pencadangan Ekosistem Gambut												
C.I.1	Penentuan lokasi pencadangan dan moratorium izin baru di kawasan ekosistem gambut	C.I.1.2	Pengembangan kebijakan pemeliharaan dan pencadangan ekosistem gambut	Terdapat dokumen kebijakan pemeliharaan dan pencadangan ekosistem gambut	1 dokumen kebijakan provinsi	v	v					Dinas Kehutanan, UPT KLHK, DLHP perusahaan, NGO, mitra pembangunan, lembaga restorasi
		C.I.1.3	Integrasi alokasi pencadangan ekosistem gambut ke dalam penataan ruang	Alokasi pencadangan ekosistem gambut terintegrasi dalam penataan ruang	1 dokumen	v	v					Dinas PUBMPR, Bappeda, Dinas Kehutanan

No	Strategi dan arah kebijakan	No Program	Program	Indikator kinerja program	Target	Indikasi Tata Waktu (per 5 tahun)						Instansi pelaksana
						I	II	III	IV	V	VI	
C.II Pelestarian Ekosistem Gambut												
C.II.1	Pelestarian Ekosistem Gambut dengan para pihak	C.II.1.1	Pelibatan masyarakat, pihak swasta dan NGO dalam pelestarian fungsi ekosistem gambut	Terlibatnya masyarakat, pihak swasta dan NGO dalam pelestarian fungsi ekosistem gambut	300 parapihak (stakeholder, kelompok masyarakat, swasta)	v	v	v	v	v	v	DLHP, Dinas Kehutanan, UPT KLHK, Forum DAS, masyarakat, NGO, mitra pembangunan, swasta
				Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati di dalam KHG	36 KHG	v	v	v	v	v	v	DLHP, Dinas Kehutanan, UPT KLHK, Forum DAS, masyarakat, NGO, mitra pembangunan, swasta
C.II.2	Pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam KHG	C.II.2.1	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting serta (dan) Keanekaragaman Hayati Tinggi dalam KHG	Terdapat dokumen pengelolaan kawasan ekosistem penting	1 dokumen	v	v	v	v	v	v	DLHP, dinas kehutanan
				Terdapat dokumen perencanaan pembangunan Taman Kehati yang dikelola	1 dokumen	v	v	v	v	v	v	DLHP, Dinas Kehutanan, UPT KLHK, Pemerintah Kabupaten
D. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim												
D.I Mitigasi Perubahan Iklim												
D.I.1	Mitigasi pada kawasan ekosistem gambut Kegiatan Mitigasi	D.I.1.1	Integrasi strategi penurunan emisi dari ekosistem gambut dengan rencana mitigasi daerah	Dokumen penurunan emisi ekosistem gambut terintegrasi dalam rencana mitigasi daerah	1 Dokumen	v	v	v	v	v	v	Bappeda, DLHP, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, ESDM, swasta, mitra pembangunan, NGO
				Inventarisasi data penurunan emisi dan upaya mitigasi lain dari ekosistem gambut	Terdapat dokumen penurunan emisi ekosistem gambut secara berkala	1 dokumen	v	v	v	v	v	v

No	Strategi dan arah kebijakan	No Program	Program	Indikator kinerja program	Target	Indikasi Tata Waktu (per 5 tahun)						Instansi pelaksana
						I	II	III	IV	V	VI	
D.II Adaptasi Perubahan Iklim												
D.II.1	Adaptasi pada kawasan ekosistem gambut	D.II.1.1	Integrasi strategi adaptasi di ekosistem gambut dalam perencanaan daerah	Dokumen adaptasi perubahan iklim di ekosistem gambut terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah	1 Dokumen	v	v	v	v	v	v	Bappeda, DLHP, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, ESDM
		D.II.1.2	Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat di ekosistem gambut	Terdapat peta kerentanan masyarakat desa dan peta fungsi dan jasa layanan ekosistem gambut terhadap perubahan iklim	1 Dokumen	v	v	v	v	v	v	DLHP, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, DPMD, pemerintah desa, perusahaan, NGO, mitra pembangunan, Bappeda, DLHP, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, ESDM
				Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas deteksi dini pencegahan bencana untuk semua usia	1 Dokumen	v	v	v	v	v	v	Dinas Kehutanan, BPBD, DLHP, UPT KLHK

Penutup

- Dokumen RPPEG menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan berbagai elemen pemangku kepentingan untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Komitmen ini **perlu ditindaklanjuti dengan kolaborasi multipihak dan multilevel** untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, guna mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- Dokumen RPPEG merupakan bagian dari rencana pembangunan berbasis ekonomi hijau yang lebih luas. Oleh karena itu, RPPEG **perlu diimplementasikan secara tepat** supaya kebijakan perlindungan dan pengelolaan gambut dapat mendukung pencapaian pembangunan yang selaras antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- Implementasi RPPEG diwujudkan melalui keberadaan kelembagaan yang kuat, adanya pendanaan yang mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan, dan terlaksananya pengarusutamaan dan integrasi muatan RPPEG ke dalam dokumen perencanaan daerah. **Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, pendanaan dan integrasi dalam perencanaan daerah perlu terus dilakukan.**



Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
agroforestri.id/rpegsumsel



In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

